

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penilaian kualitas lingkungan hidup ada tiga, yaitu *Environmental Sustainability Index* (ESI), *Environmental Performance Index* (EPI), dan *Virginia Environmental Quality Index* (VEQI). Dari ketiga penilaian kualitas lingkungan tersebut, Indonesia menggunakan EQI dalam menilai kualitas lingkungannya karena lebih sederhana dan mudah dipahami serta data yang tersedia relative lengkap dan berkelanjutan.

Tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan *Danish International Development Agency* (DANIDA) yang berasal dari negara Denmark untuk menyusun IKLH di Indonesia dengan mengusung konsep dari EPI. Badan pusat statistik Indonesia juga mengembangkan IKLH pada tahun 2008 sehingga konsep yang dikembangkan mengadopsi konsep dari BPS dan *Virginia Commonwealth University* (VCU) yang telah dimodifikasi.

Terdapat tiga komponen untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana setiap komponen indeks memiliki bobot tersendiri, yaitu:

1. Indeks Kualitas Udara (30%)

Parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara adalah NO₂ dan SO₂.

2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (40%)

Parameter yang digunakan dalam mengukur indeks kualitas tutupan lahan adalah konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik wilayah secara spasial.

3. Indeks Kualitas Air (30%)

Perhitungan kualitas air digunakan metode Indeks Pencemaran (IP). Parameter yang digunakan dalam mengukur indeks kualitas air adalah Total Fosfat, Fecal Coli, Total Caliform, TSS, DO, BOD, dan COD.

Perhitungan rumus IKLH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\text{IKLH Provinsi} = (40\% \times \text{IKTL}) + (30\% \times \text{IKU}) + (30\% \times \text{IKA})$$

Terdapat tingkatan predikat dalam IKLH:

| No. | Nilai IKLH | Predikat |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1 | $30 < \text{IKLH} \leq 40$ | WASPADA |
| 2 | $40 < \text{IKLH} \leq 50$ | SANGAT KURANG BAIK |
| 3 | $50 < \text{IKLH} \leq 60$ | KURANG BAIK |
| 4 | $60 < \text{IKLH} \leq 70$ | CUKUP |
| 5 | $70 < \text{IKLH} \leq 80$ | BAIK |
| 6 | $\text{IKLH} > 80$ | SANGAT BAIK |

2.1.2 Kemiskinan

Dilansir dari Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, papan,

dan pangan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin dikatakan jika rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

2.1.2.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan gambaran pengeluaran minimum rupiah untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan non-makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan jika dikonversi dalam kalori, maka itu 2100 kilokalori per hari. Garis kemiskinan non-makanan adalah nilai pengeluaran minimum dalam bentuk tidak makanan seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

GK = GKM + GKNM

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non-Makanan

2.1.2.2 Tingkat Kemiskinan

Dilansir dari Pemda DIY, tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah atau negara.

2.1.3 Penanaman Modal Asing

Undang-undang No.11 tahun 1970 menyatakan penanaman modal asing merupakan penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan proyek di Indonesia dan dalam hal ini pemilik modal secara langsung menanggung resiko atas penanaman modal tersebut. Penanaman modal asing melibatkan langsung pihak investor dalam operasional usaha yang selaras dengan dinamika perusahaan investor sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak lepas dari kepentingannya (Ambasari, Indah, & Purnomo, 2005). Terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi jika ingin perusahaan luar negeri ingin melakukan penanaman modal di Indonesia, yaitu perusahaan harus mempunyai keunggulan dari perusahaan yang lain, wajib menguntungkan dengan memanfaatkan sendiri keunggulan itu daripada menjual atau menyewakan ke perusahaan lain dan wajib menguntungkan dengan menggunakan keunggulan itu dalam gabungan paling tidak beberapa input yang berlokasi di luar negeri (Sarwedi, 2002). Investasi tidak langsung atau portofolio adalah penanaman modal yang dilakukan di luar negeri. Para penanam modal membeli ekuitas dengan harapan mendapatkan manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk portofolio sering dijumpai seperti pembelian saham atau obligasi dalam negeri yang dilakukan oleh pihak asing tanpa kendali manajemen di perusahaan investasi. (Ambasari, Indah, & Purnomo, 2005). Penanaman modal asing meningkatkan kapasitas pertumbuhan ekonomi disebut langkah aman dalam membiayai pembangunan karena digunakan

sebagai kepemilikan dan kendali atas pengadaan peralatan, pembangunan pabrik, dan pra sarana.

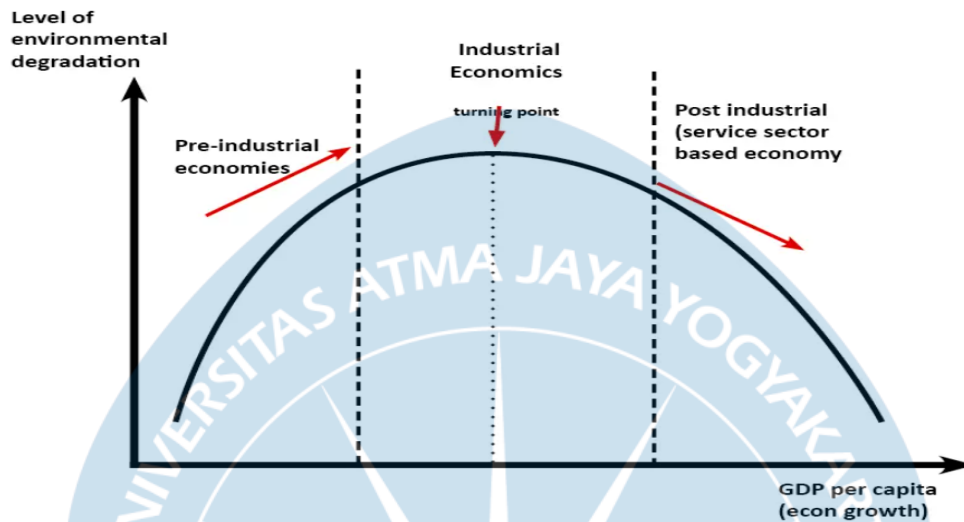
2.1.4 Kepadatan Penduduk

Dilansir dari BPS Kependudukan, penduduk merupakan orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk merupakan total orang yang tinggal di suatu wilayah. Cara menjumlahkan jumlah penduduk di suatu wilayah adalah dengan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Setelahnya pada tingkat regional dan nasional, data yang diperoleh ditambahkan dengan data penduduk desa yang lain kedalam bentuk catatan. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per Km².

2.1.5 Teori Enviromental Kuznet Curve

Teori *Enviromental Kuznet Curve* (EKC) merupakan teori untuk melihat korelasi antara pendapatan perkapita dengan degradasi lingkungan. Diagram kurva EKC berbentuk U terbalik dengan garis horizonnya adalah pendapatan perkapita dan garis vertikalnya adalah level degradasi lingkungan. Semakin tinggi pendapatan

perkapita maka cenderung tinggi pula kerusakan lingkungan terjadi.



Sumber: Tejvan Pettinger (2019)

Gambar 2.1
Kurva Lingkungan Kuznets

Masa pra-industri merupakan masa awal pembangunan suatu negara dimana biasanya transisi dari negara agraria menjadi negara industri. Industri yang dimaksud adalah industri manufaktur. Pada masa pra-industri, kesadaran pemerintah dan masyarakat minim dan menganggap kualitas lingkungan merupakan suatu yang tersier atau sesuatu yang tidak mendesak karena terus berupaya meningkatkan pendapatan. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam begitu masif supaya produksi berjalan dan menghasilkan keluaran yang besar sehingga kualitas lingkungan menurun.

Setelah terjadi kerusakan lingkungan terjadi dan mendapatkan pendapatan, masuklah pada masa industry/*turning point* (titik balik) yaitu kerusakan lingkungan

tidak lagi diikuti oleh pertumbuhan ekonomi sebab ekonomi tumbuh dan kerusakan lingkungan menurun. Pada masa industri, pemerintah dan masyarakat mulai menyadari bahwa kualitas lingkungan hidup merupakan suatu yang primer atau sesuatu yang mendesak karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan sudah didapatkan.

Masa pasca industri, masa dimana industri manufaktur mengalami kelesuan sehingga industri dibidang jasa lebih diminati. Pada masa ini bisa terjadi deindustrialisasi. Menurut KEMENPERIN, deindustrialisasi merupakan proses kebalikan dari industrialisasi yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.

2.2 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Finanda & Gunarto (2022) yang menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta tingkat kemiskinan terhadap IKLH di Pulau Sumatra dari tahun 2011-2019 dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IKLH Pulau Sumatra. Sementara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridena (2021) menganalisis perspektif kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menggunakan regresi data panel dari 33 Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi Kalimantan Utara karena ketidaklengkapan data, dari tahun 2013-2018 menunjukkan hasil bahwa penduduk miskin di perkotaan

berpengaruh signifikan dan berpotensi terhadap degradasi lingkungan dibandingkan penduduk miskin yang tinggal di perdesaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2020) menganalisis pengaruh PDRB, PMA, dan kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa Tahun 2010-2019. Metode yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan Common Effect Model menunjukkan hasil yaitu penanaman modal asing dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap kerusakan lingkungan. Sedangkan PDRB berpengaruh positif terhadap kerusakan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pranoto & Halim (2016) menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, PDRB, Kepadatan Penduduk, dan Penanaman Modal Asing Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup. Studi yang dilakukan di Indonesia dari tahun 2009-2013 menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup provinsi di Indonesia. PDRB berpengaruh negatif terhadap kualitas lingkungan hidup provinsi di Indonesia. Kepadatan penduduk dan PMA berpengaruh juga negatif terhadap kualitas lingkungan hidup provinsi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Safriwan & Idris (2021) menganalisis pengaruh globalisasi, kepadatan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi terhadap degradasi lingkungan di Indonesia dengan menggunakan data time series dari tahun 1971-2017 dan menggunakan metode *Error Correction Model* menunjukkan hasil pertumbuhan

ekonomi dalam jangka pendek dan panjang memiliki pengaruh positif terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia. Kepadatan penduduk memiliki pengaruh positif dalam jangka panjang dan tidak berpengaruh dalam jangka pendek terhadap kerusakan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) menganalisis pengaruh jumlah penduduk, kontribusi produk domestik regional bruto sektor industri dan konsumsi rumah tangga terhadap IKLH pada enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014 menunjukkan hasil bahwa ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap IKLH secara simultan.

